

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD. Dalam hasil data lapangan yang sudah peneliti lakukan, peneliti telah melakukan proses wawancara terhadap 27 narasumber yang terdiri dari pemerintah desa ketua dan wakil badan permusyawaratan desa, dari masyarakat yaitu tokoh pemuda, tokoh agama, lansia, warga berkebutuhan khusus, tenaga kesehatan desa, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, dan pengurus TK/TPA yang berada di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara. Dari ke 27 narasumber, peneliti mewawancarai sebanyak 18 warga perempuan dan 9 warga laki-laki.

Terhadap 27 narasumber ini, peneliti telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Adapun daftar pertanyaan akan dilampirkan Bersama skripsi.

**Tabel 8. Narasumber Penelitian**

No	Narasumber	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Pemerintah Desa	1	-	1
2	BPD	-	2	2
3	Tokoh Agama	-	2	2
4	Pemuda	3	3	6
5	Tenaga Kesehatan Desa	1	-	1
6	Ibu-ibu PKK	3	-	3
7	Ibu-ibu Pengajian	2	-	2
8	Lansia	5	1	6
9	Pengurus TK/TPA	2	-	2
10	Warga Berkebutuhan Khusus	1	1	2
<b>Jumlah</b>		18	9	27

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara mengenai proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD, maka peneliti telah mendapatkan data yang dibutuhkan. Terhadap data yang sudah peneliti dapatkan, maka peneliti akan melakukan pengolahan data dan Analisa data. Dari data-data yang peneliti peroleh, maka peneliti akan menganalisisnya menggunakan Teori Demokrasi Representasi Anthony H. Birch dan Teori Sistem Politik dari David Easton.

Data-data yang sudah diperoleh dan telah terkumpul akan dianalisa dengan teori dan indikator-indikator berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut, sehingga nantinya peneliti bisa menyimpulkan seperti apa nantinya hasil yang didapat dari penelitian mengenai Interaksi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

#### **A. Proses Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir**

Hasil data yang peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara kepada BPD dan Masyarakat Desa Bakung dalam merespon fenomena penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD. Dari 27 narasumber yang sudah peneliti wawancarai, 15 diantaranya sudah mengetahui tugas dan fungsi dari BPD tapi pada umumnya banyak yang tidak mengetahui fungsi dan tugas dari BPD. Sehingga dari situ peneliti melihat bahwa adanya permasalahan dari

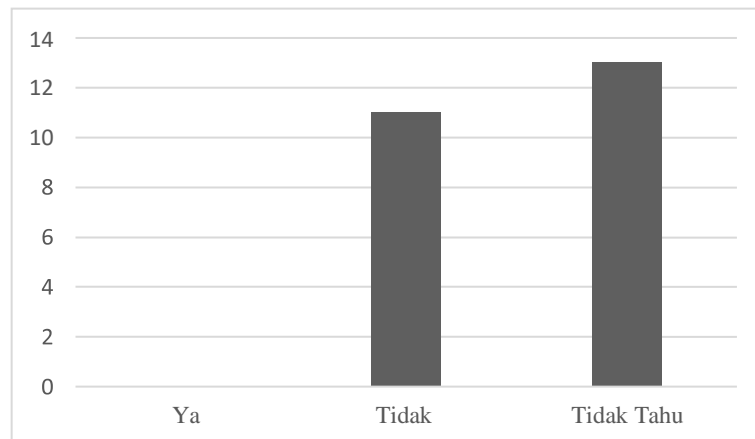
BPD di Desa Bakung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wadah masyarakat desa dalam menyerap aspirasi di tingkat desa.

Untuk mengetahui apakah BPD di Desa Bakung sudah berjalan dengan baik atau belum peneliti mengukurnya melalui indikator-indikator yang telah peneliti lampirkan bersama skripsi. Melalui indikator-indikator tersebut peneliti akan menganalisa dan menyimpulkan bahwa BPD di Desa Bakung terindikasi atau tidak terindikasi dalam melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Adapun hasil data yang peneliti dapatkan melalui wawancara bersama narasumber akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

Dalam mendapatkan jawaban dari penelitian ini, peneliti telah mengajukan pertanyaan kepada masyarakat terkait 6 tugas dan fungsi mengenai penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD dan 6 tugas itu terdiri dari 22 pertanyaan terkait penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD terhadap 24 narasumber yang akan penulis wawancarai.

Dari pertanyaan pertama yang diajukan peneliti mengenai tugas pertama BPD yaitu “menggali aspirasi masyarakat” diturunkan menjadi 5 pertanyaan, dari 24 narasumber tidak ada yang menjawab “Ya”, terdapat 11 yang menjawab “Tidak” dan 13 menjawab “Tidak Tahu”.

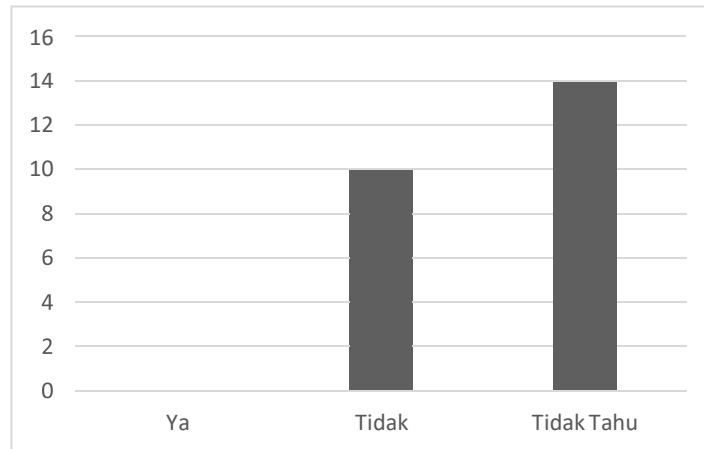
**Grafik 1. Menggali aspirasi masyarakat**



Jadi, setelah peneliti mewawancarai masyarakat terkait apakah BPD telah melaksanakan tugasnya dalam menggali aspirasi masyarakat, tidak ada satupun narasumber yang menjawab “Ya”. Bahkan terdapat 11 narasumber yang menjawab “Tidak”, maka peneliti mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa BPD di desa bakung tidak memenuhi indikator-indikator terkait dengan menggali aspirasi masyarakat, yaitu tidak menggali aspirasi masyarakat, tidak menemui unsur-unsur masyarakat misalnya kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, tidak menggali aspirasi masyarakat menggunakan panduan kegiatan BPD dan hasilnya tidak disampaikan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dengan tidak terpenuhinya indikator-indikator ini berarti BPD di Desa Bakung tidak melaksanakan tugas pertamanya yaitu menggali aspirasi masyarakat.

Kemudian pada pertanyaan kedua terkait tugas BPD yaitu “menampung aspirasi masyarakat” terdiri dari 2 pertanyaan, dari 24 narasumber tidak ada satupun yang menjawab “Ya”, 10 narasumber menjawab “Tidak” dan 14 menjawab “Tidak Tahu”

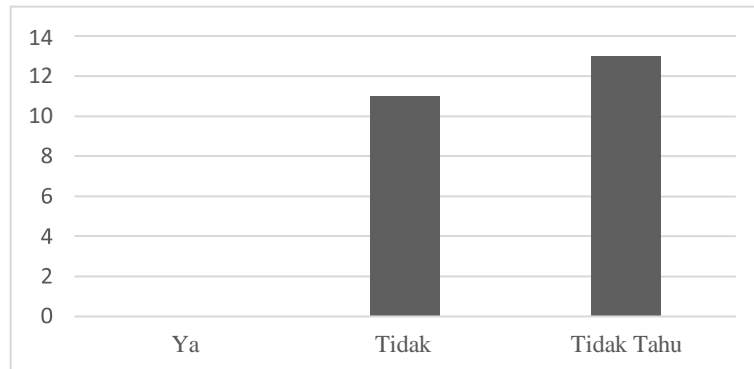
**Grafik 2. Menampung Aspirasi Masyarakat**



Bahwa dari jawaban pertanyaan kedua yang didapatkan peneliti, maka peneliti mendapatkan informasi dan data bahwa BPD di desa bakung tidak memenuhi dua indikator dalam tugas menampung aspirasi masyarakat yaitu menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD dan dengan demikian juga tidak melaksanakan kegiatan pengadministrasian aspirasi masyarakat. Jadi, dari jawaban ini diketahui bahwa BPD di desa bakung tidak memenuhi indikator melakukan tugas kedua yaitu menampung aspirasi masyarakat.

Kemudian pertanyaan ketiga terkait tugas BPD yang ketiga yaitu “pengelolaan aspirasi masyarakat” terdiri 3 pertanyaan dari 24 narasumber tidak ada satupun yang menjawab “Ya”, 11 menjawab “Tidak”, sedangkan 13 menjawab “Tidak Tahu”.

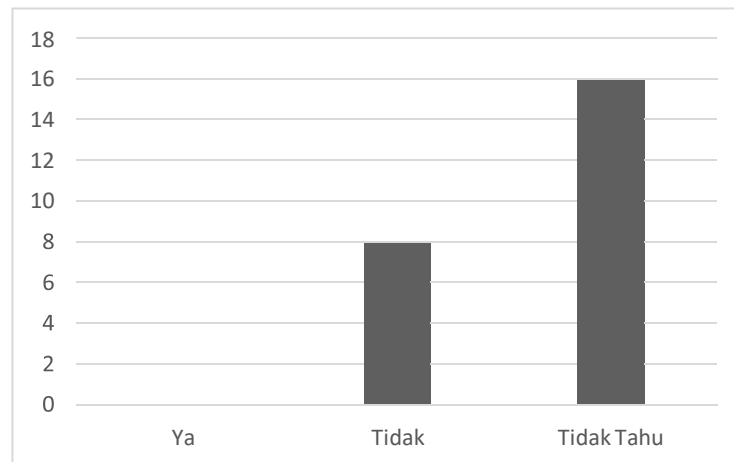
**Grafik 3. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**



Berdasarkan jawaban masyarakat atas pertanyaan peneliti mengenai tugas BPD dalam pengelolaan aspirasi masyarakat, maka peneliti mendapatkan informasi dan penelitipun mengetahui bahwa BPD di desa bakung tidak memenuhi indikator pelaksanaan tugas ke tiga yaitu tidak mengelola aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian, tidak mengelola aspirasi masyarakat berdasarkan pembedangan, tidak melakukan analisa dan merumuskan aspirasi untuk disampaikan ke kepala desa. Dengan tidak terpenuhinya indikator-indikator ini maka BPD tidak melaksanakan tugas ketiga yaitu mengelola aspirasi masyarakat.

Kemudian pertanyaan keempat terkait tugas BPD mengenai “penyaluran aspirasi masyarakat” terdiri 3 pertanyaan dari 24 narasumber tidak ada yang menjawab “Ya” 8 menjawab “Tidak” sedangkan 16 menjawab “Tidak Tahu”

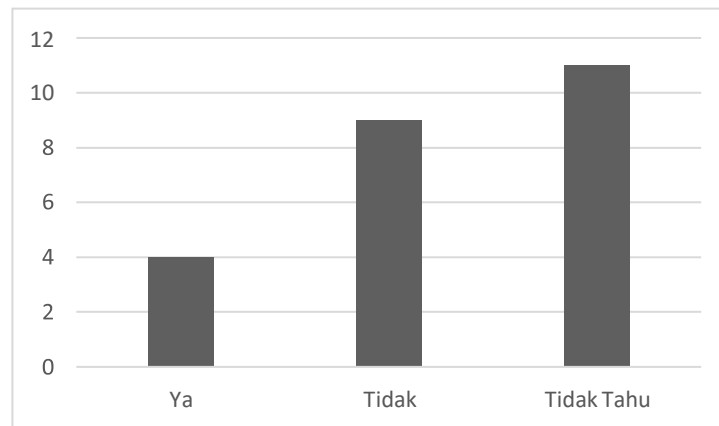
**Grafik 4. Penyaluraan Aspirasi Masyarakat**



Bahwa selanjutnya dari jawaban pertanyaan keempat yang didapatkan peneliti dari 8 narasumber yang menjawab “Tidak”, maka peneliti mendapatkan informasi dan data bahwa BPD di desa bakung tidak melakukan kegiatan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan indikator-indikator tersebut yaitu tidak menyalurkan aspirasi masyarakat ke kepala desa secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian dari jawaban ini diketahui bahwa BPD di desa bakung tidak melakukan tugas keempat yaitu mengenai penyaluran aspirasi masyarakat.

Kemudian pertanyaan kelima terkait tugas BPD mengenai “penyelenggaraan musyawarah BPD” terdiri 3 pertanyaan dari 24 narasumber 4 menjawab “Ya” 9 narasumber yang menjawab “Tidak” dan 11 menjawab “Tidak Tahu”.

**Grafik 5. Penyelenggaraan Musyawarah BPD**

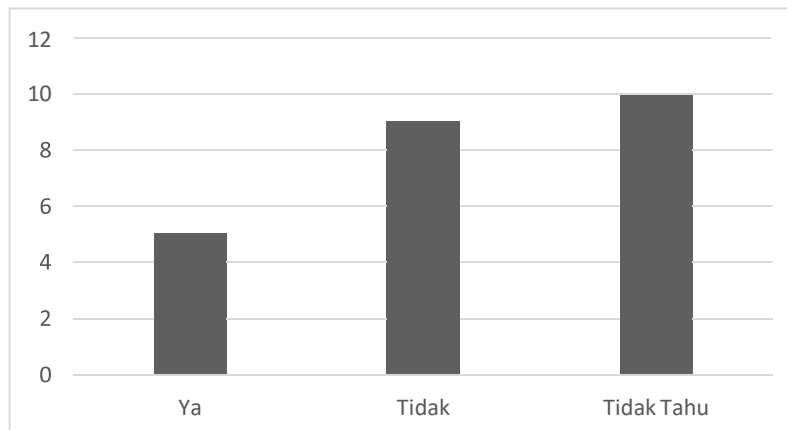


Dari jawaban 4 narasumber mengatakan “Ya” ada kegiatan penyelenggaraan musyawarah BPD tapi 9 narasumber mengatakan “Tidak ada”, untuk itu penulis mengajukan pertanyaan lebih dalam lagi terkait dengan kegiatan penyelenggaraan musyawarah BPD kepada 4 narasumber yang menjawab “Ya”. Setelah peneliti menanyakan lebih mendalam, maka peneliti menganalisa bahwa jawaban yang dimaksud dari 4 narasumber itu bukan penyelenggaraan musyawarah BPD tetapi musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang dihadiri oleh BPD. Sehingga dari jawaban 9 narasumber yang menjawab “Tidak” diketahui bahwa BPD di desa bakung tidak melaksanakan tugas kelima yaitu dalam penyelenggaraan musyawarah BPD.

Selanjutnya pertanyaan terakhir terkait tugas BPD yang keenam mengenai penyelenggaraan musyawarah desa terdiri 6 pertanyaan dari 24 narasumber 5 menjawab “Ya” ada musyawarah desa 9 menjawab “Tidak” dan 10 narasumber menjawab “Tidak Tahu”.



**Grafik 6. Penyelenggaraan Musyawarah Desa**



Jadi, dari jawaban 5 narasumber mengatakan “Ya” ada kegiatan musyawarah desa tapi 9 narasumber mengatakan “Tidak ada”, untuk itu peneliti mengajukan pertanyaan lebih dalam lagi kepada 5 narasumber yang menjawab “Ya”. Setelah peneliti menanyakan lebih mendalam, maka peneliti menganalisis jawaban bahwa yang dimaksud dari 5 narasumber itu bukan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD tetapi musyawarah desa setahun sekali yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dengan demikian maka berarti BPD didesa bakung tidak melaksanakan tugas keenam yaitu penyelenggaraan musyawarah desa.

Setelah peneliti menanyakan pertanyaan kepada masyarakat terkait tentang keenam tugas BPD tersebut peneliti menyimpulkan hasil dari wawancara kepada masyarakat dari keenam tugas itu sudah dilaksanakan atau tidak oleh BPD dapat dilihat dari table berikut ini:

**Tabel 9. Jumlah hasil wawancara dengan masyarakat**

No	Tugas BPD	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Jumlah
1	Menggali Aspirasi Masyarakat	0	11	13	24
2	Menampung Aspirasi Masyarakat	0	10	14	24
3	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	0	11	13	24
4	Penyaluran Aspirasi Masyarakat	0	8	16	24
5	Penyelenggaraan Musyawarah BPD	4	9	11	24
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5	9	10	24

Jadi, dari table diatas tergambar bahwa hasil wawancara peneliti kepada narasumber yang peneliti tanyakan mengenai tugas terkait penyerapan aspirasi oleh BPD yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, pengelolaan aspirasi masyarakat, penyaluran aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah BPD dan penyelenggaraan musyawarah desa dari ke enam tugas BPD tersebut belum berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Terlihat dari jawaban yang diberikan oleh narasumber pada saat peneliti menanyakan mengenai tugas penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Bakung.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap jawaban yang masyarakat berikan bahwa dari keseluruhan indikator-indikator pelaksanaan tugas BPD tidak dipenuhi oleh BPD Desa Bakung. Adapun indikatornya akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

**Tabel 10. Terpenuhi / Tidak Terpenuhi  
Indikator Pelaksanaan Tugas BPD Menurut Masyarakat**

No	Indikator Pelaksanaan Tugas	Terpenuhi / Tidak Terpenuhi
1	BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat.	Tidak Terpenuhi
2	BPD menemui unsur-unsur masyarakat desa yaitu: lembaga yang ada di masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.	Tidak Terpenuhi
3	Penggalian aspirasi masyarakat yang didasarkan pada keputusan hasil musyawarah BPD yang tertuang dalam agenda kerja BPD	Tidak Terpenuhi
4	Penggalian aspirasi masyarakat oleh BPD menggunakan panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.	Tidak Terpenuhi
5	Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.	Tidak Terpenuhi
6	Melaksanakan Kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.	Tidak Terpenuhi
7	Mengadministrasikan aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah BPD.	Tidak Terpenuhi
8	BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.	Tidak Terpenuhi
9	Pengadministrasian BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Tidak Terpenuhi
10	Perumusan aspirasi oleh BPD dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.	Tidak Terpenuhi

11	BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan.	Tidak Terpenuhi
12	Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat kepada BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.	Tidak Terpenuhi
13	Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.	Tidak Terpenuhi
14	Musyawah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.	Tidak Terpenuhi
15	Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.	Tidak Terpenuhi
16	BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;</li> <li>▪ musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;</li> <li>▪ pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;</li> <li>▪ apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;</li> <li>▪ pemungutan suara sebagaimana dimaksud dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan</li> <li>▪ hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh</li> </ul>	Tidak Terpenuhi

	sekretaris BPD.	
17	Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.	Tidak Terpenuhi
18	Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Tidak Terpenuhi
19	Hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ penataan Desa;</li> <li>▪ perencanaan Desa;</li> <li>▪ kerja sama Desa;</li> <li>▪ rencana investasi yang masuk ke Desa;</li> <li>▪ pembentukan BUM Desa;</li> <li>▪ penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan</li> <li>▪ kejadian luar biasa.</li> </ul>	Tidak Terpenuhi
20	Unsur masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tokoh adat;</li> <li>▪ tokoh agama;</li> <li>▪ tokoh masyarakat;</li> <li>▪ tokoh pendidikan;</li> <li>▪ perwakilan kelompok tani;</li> <li>▪ perwakilan kelompok nelayan;</li> <li>▪ perwakilan kelompok perajin;</li> <li>▪ perwakilan kelompok perempuan;</li> <li>▪ perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan</li> <li>▪ perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.</li> </ul>	Tidak Terpenuhi
21	Selain unsur masyarakat musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.	Tidak Terpenuhi
22	Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;	Tidak Terpenuhi

Untuk membuktikan apakah jawaban dari masyarakat ini benar atau tidak terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD, maka peneliti telah mewawancarai pemerintah desa dan dua anggota BPD adapun jawaban dari kedua anggota BPD terkait pertanyaan pertama yaitu “menggali aspirasi masyarakat”, memiliki jawaban yang sama adapun tanggapan dari anggota BPD peneliti mendapatkan informasi bahwa terkait dengan menggali aspirasi masyarakat jawaban yang diberikan oleh kedua anggota BPD yaitu menjawab “Tidak”, “untuk saat ini umumnya kami memang belum melakukan kegiatan menggali aspirasi masyarakat sebagaimana mestinya”.

Hasil dari analisis peneliti terhadap jawaban yang diberikan oleh kedua anggota BPD kepada peneliti ialah terkait dengan tugas menggali aspirasi masyarakat yaitu terkendala dengan keadaan dimana seluruh anggota BPD di Desa Bakung memiliki pekerjaan yang berbeda setiap anggotanya, sehingga BPD tidak pernah turun untuk menggali aspirasi masyarakat dari situ peneliti mendapatkan jawaban bahwa BPD di desa bakung tidak menggali aspirasi masyarakat. Jadi, dengan demikian hal tersebut yang membuat tugas pertama BPD tidak berjalan.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan kepada kedua anggota BPD terkait tugas kedua dari BPD yaitu “menampung aspirasi masyarakat”, adapun jawaban dari kedua anggota BPD kepada peneliti memiliki jawaban yang sama yaitu menjawab “Ya”, menurut anggota BPD ada kegiatan menampung aspirasi masyarakat, karena itu peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut lagi kepada anggota BPD, Setelah peneliti menanyakan lebih

mendalam, maka peneliti dapat menganalisa dari jawaban bahwa yang dimaksud dari kedua anggota BPD itu bukan menampung aspirasi masyarakat secara langsung tetapi BPD menerima aspirasi itu dari kepala desa.

Hasil dari analisis peneliti terhadap jawaban dari anggota BPD peneliti melihat bahwa anggota BPD tidak melakukan kegiatan menampung aspirasi masyarakat, karena anggota BPD tidak menjelaskan kepada masyarakat bahwa tugas dari BPD yaitu menampung aspirasi masyarakat. Karena adanya miskomunikasi antara anggota BPD dengan masyarakat Sehingga masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung ke kepala desa bukan ke BPD.

Kemudian untuk pertanyaan ketiga yang peneliti tanyakan kepada kedua anggota BPD mengenai tugasnya yaitu “mengelola aspirasi masyarakat”, adapun jawaban yang diberikan oleh kedua anggota BPD kepada peneliti memiliki jawaban yang sama yaitu “Ya” ada kegiatan mengelola aspirasi masyarakat, untuk itu penelitipun mengajukan pertanyaan lebih dalam lagi kepada kedua anggota BPD, Setelah peneliti menanyakan lebih mendalam, maka peneliti mendapatkan jawaban dan menganalisa jawaban bahwa yang dimaksud dari kedua anggota BPD itu mengelola hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh kepala desa bukan hasil dari masyarakat yang menyalurkan langsung aspirasinya ke BPD.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan keempat kepada kedua anggota BPD mengenai tugasnya yaitu “penyaluran aspirasi masyarakat”, adapun jawaban dari kedua anggota BPD memiliki jawaban yang sama yaitu “Tidak”, karena “masyarakat tidak menyalurkan aspirasinya kepada kami

sebagai anggota BPD karena yang menyampaikan aspirasi masyarakat ke anggota BPD adalah kepala desa”. Sehingga dari situ peneliti melihat dan menganalisa bahwa BPD didesa bakung tidak melakukan tugasnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat disampaikan ke kepala desa, tetapi disini kepala desa yang menyampaikan aspirasi masyarakat ke anggota BPD.

Pertanyaan selanjutnya terkait penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD peneliti menanyakan kepada kedua anggota BPD mengenai tugas kelima dari BPD yaitu “penyelegaraan musyawarah BPD”, adapun jawaban yang diberikan oleh kedua anggota BPD yaitu “Ya” anggota BPD menyelegaraan musyawarah BPD berdasarkan jawaban yang diberikan oleh kedua anggota BPD penelitipun menanyakan lebih dalam lagi kepada kedua anggota BPD, adapun setelah peneliti menanyakan lebih mendalam, maka peneliti mendapatkan jawaban dan menganalisa jawaban dari kedua anggota BPD bahwa penyelenggaraan musyawarah BPD pada umumnya jarang dilaksanakan dan itupun kalau dilaksanakan hanya sebagian anggota BPD menghadiri musyawarah tersebut.

Pertanyaan terakhir peneliti menanyakan kepada kedua anggota BPD terkait tugas keenam dari BPD yaitu “penyelenggaraan musyawarah Desa” jawaban yang di berikan oleh kedua anggota BPD yaitu “Ya” melaksanakan musyawarah desa, sehingga dari jawaban yang diberikan oleh kedua anggota BPD berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh penulis maka penelitipun menanyakan lebih mendasar lagi kepada kedua anggota BPD dan peneliti menganalisa jawaban bahwa penyelenggaraan musyawarah desa itu memang



ada tetapai setelah peneliti melanjutkan pertanyaan terkait musyawarah yang dilaksanakan itu ternyata musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

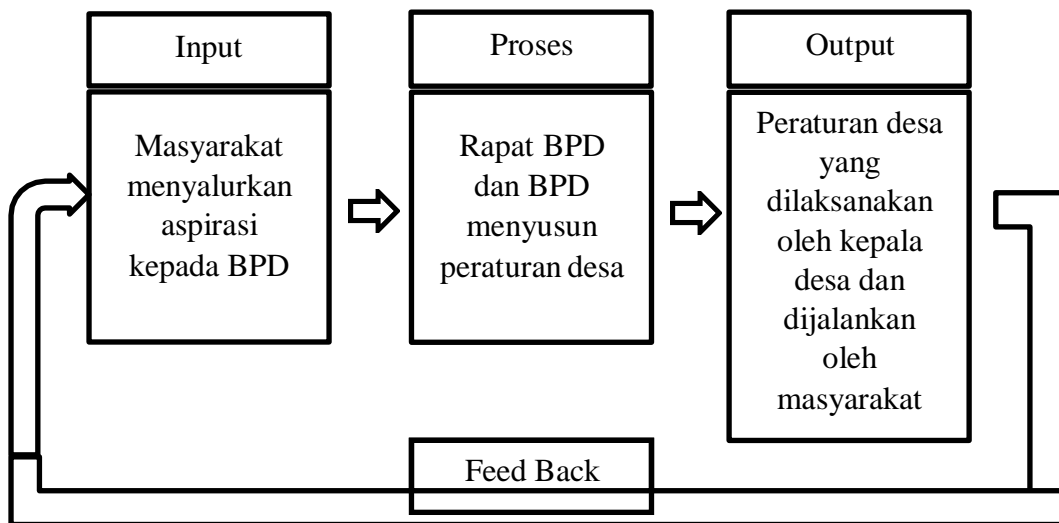
Bahwa hasil dari wawancara peneliti kepada pemerintah desa dan anggota BPD yang peneliti tanyakan mengenai tugas penyerapan aspirasi masyarakat, anggota BPD umumnya banyak menjawab ya tetapi setelah peneliti melanjutkan pertanyaan lebih mendalam sehingga jawaban yang diberikan setelah peneliti menganalisisnya umumnya tidak dilakukan. Sehingga peneliti mengkonfirmasi kepada pemerintahan desa bahwa memang benar kurang terlihatnya tugas dan fungsi BPD. Jadi, dari ke 22 indikator itu tidak dilaksanakan oleh anggota BPD yang peneliti tanyakan kepada anggota BPD tersebut belum berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya.

Terlihat dari jawaban yang diberikan oleh anggota BPD pada saat peneliti menanyakan mengenai tugas penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Bakung.

Kemudian, peneliti menganalisis data menggunakan teori sistem politik dari David Easton dimana sistem politik dapat di jelaskan bahwa BPD dengan masyarakat memiliki hubungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyerap aspirasi masyarakat. Bahwa proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD itu posisinya berada pada sisi input, selanjutnya BPD Menggali, Menampung, Mengelola, dan Menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai proses input. Setelah dari proses input BPD melakukan proses Menyelenggarakan musyawarah BPD sehingga hasil dari aspirasi masyarakat yang selanjutnya dimusyawarahkan oleh BPD,

outputnya berupa peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa, dijalankan oleh masyarakat dan hasil akhir yang berupa kebijakan atau peraturan desa.

**Bagan 4. Siklus Teori Sistem Politik**



Persoalan tentang proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD dianalisis menggunakan teori sistem politik dari David Easton. Sehingga apa yang terjadi bisa dijelaskan menggunakan teori sistem politik. Karena, interaksi hubungan antara BPD dengan masyarakat itu merupakan sebuah sistem, dari teori tersebut dapat di jelaskan bahwa BPD dengan masyarakat memiliki hubungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, teori sisitem politik pada penelitian ini merupakan sebuah pemahaman mengenai suatu sistem yang saling berhubungan antara BPD sebagai orang yang menyerap aspirasi dengan masyarakat yang menyalurkan aspirasinya.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Proses Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Bakung**

Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara dengan masyarakat, pemerintah desa, anggota BPD dan hasil observasi, maka peneliti mendapatkan informasi bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD tidak berjalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga permusyawaratan desa, dimana dibentuknya lembaga tersebut seharusnya dapat menjunjung aspirasi masyarakat dan meningkatkan proses demokratisasi di desa.

Sehingga dari tidak berjalannya Badan Permusyawaratan Desa di Desa bakung dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat desa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal dari anggota BPD di Desa Bakung diantaranya di sebabkan oleh:

- Tingkat pendidikan anggota BPD yang rata-rata hanya lulusan SMA dan kurangnya pengalaman dari masing-masing anggota dalam keikutsertaan organisasi dalam bidang kepemimpinan. Meskipun ada beberapa orang yang berpendidikan sarjana seperti sekretaris dan anggota di Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat, namun tentu saja menimbulkan ketidaksinambungan dalam kerjanya.
- BPD Desa Bakung kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh BPD yang bersifat pasif sehingga hubungan yang terjadi antara BPD dengan masyarakat kurang terjalin

dengan baik dan BPD yang seharusnya menjadi wadah dalam penyerapan aspirasi masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- Belum adanya kesadaran dari anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pada penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan yang mendorong terpilihnya para anggota BPD Desa Bakung berasal dari dorongan beberapa orang dan ada juga yang berasal atas dasar kepentingan pribadi paska Pilkades (Pemilihan Umum Kepala Desa). Berdasarkan alasan masuknya anggota BPD yang bukan atas dasar kemauan diri sendiri tersebut membuat etos kerja BPD menjadi rendah serta menganggap menjadi anggota BPD hanya sebagai status saja bukan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- Pembagian waktu dari masing-masing anggota BPD belum teratur. Profesi diluar menjadi anggota BPD yang menyita banyak kesibukan membuat frekuensi kerja para anggota menjadi berkurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagian anggota beprofesi sebagai pegawai swasta dan petani yang tidak mempunyai banyak waktu, untuk menuangkan tenaga dan pikirannya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai anggota BPD. Dari kedua profesi yang dimiliki para anggota BPD tidak terdapat keselarasan waktu antara anggota BPD satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan komunikasi antar anggota tidak terjalin dengan baik.

- Tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD Desa Bakung untuk menunjang kinerja BPD dalam penyerapan aspirasi. Sehingga kinerja BPD tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatas karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja mereka.
- Tidak adanya sumber dana bagi anggota BPD sehingga tidak memacu motivasi anggota BPD untuk bekerja secara optimal dan bersungguh-sungguh dalam upaya memajukan dan menciptakan desa yang lebih baik. Permasalahan pendanaan dialami oleh BPD di Desa Bakung, karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD kurang mencukupi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak berjalannya proses penyerapan aspirasi masyarakat di desa bakung. Faktor tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan tugas BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat desa. Itulah faktor-faktor penyebab tidak berjalannya proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD desa bakung.

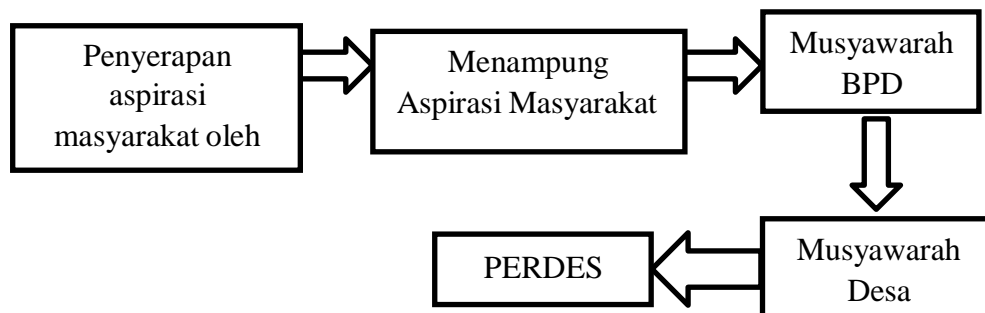
### **C. Dampak Dari Tidak Adanya Proses Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Bakung**

Akibatnya dengan tidak berjalannya tugas BPD dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat, maka akan menghasilkan suatu dampak yang buruk dalam perkembangan desa. Jadi, otomatis dengan tidak adanya proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD. Maka Perdes (Peraturan Desa) yang dibuat itu berarti sebenarnya bukan hasil dari aspirasi masyarakat.

Karena seharusnya proses Perdes itu hasil dari aspirasi masyarakat yang selanjutnya ditampung oleh BPD, dimusyawarahkan antar BPD, dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat desa, kemudian dijadikan Perdes dan selanjutnya perdes dilaksanakan oleh desa.

Tetapi disini dibuat oleh pemerintahan desa secara sepihak tidak melibatkan masyarakat. Itu berdasarkan hasil analisa, hasil observasi dan wawancara peneliti kepada masyarakat dan anggota BPD. Kemudian penelitipun mengkonfirmasi hal ini langsung bersama dengan sekertaris desa dan sekertaris desa membenarkan hal itu memang benar terjadi.

**Bagan 5. Proses pembuatan perdes**



Sehingga dengan tidak adanya proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD, berarti akibatnya tidak ada perdes yang dibuat berdsarkan aspirasi masyarakat. Sehingga perdes-perdes yang ada sekarang tidak dibuat berdasarakan aspirasi masyarakat berarti sudah otomatis tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun dampak-dampak dari tidak adanya penyerpan aspirasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- Peraturan desa yang ada tidak dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat

- Peraturan desa yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Tujuan pembangunan desa tidak tercapai
- Dengan tidak adanya proses penyerapan aspirasi masyarakat, maka proses demokrasi ditingkat desa tidak berjalan

Sehingga berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas BPD di desa bakung dalam hal ini sebagai penyerap aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemerintah desa, anggota BPD dan masyarakat desa bakung tersebut, terlihat bahwa penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD tersebut merupakan fenomenal yang terjadi di desa yang umumnya terjadi di Indonesia dan itu juga terjadi di desa bakung kecamatan indralaya utara kabupaten ogan ilir. Dalam sudut pandang masyarakat awam masyarakat hanya menerima apa yang diberikan oleh BPD bukan dari hasil aspirasi masyarakat.

Teori demokrasi representasi menggambarkan seseorang yang memiliki tugas yang diakui untuk membela atau

memajukan kepentingan yang ditentukan oleh prinsipnya, duduknya seseorang di dalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandat. Teori representasi merupakan bagian dari yang diwakili sehingga tugas yang mewakili itu berdasarkan apa keinginan dari yang diwakili. Sehingga, dari jawaban yang diberikan oleh anggota BPD dan masyarakat di desa bakung bahwa BPD desa bakung tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Jadi, penulis melihat bahwa ada permasalahan dari BPD dalam melaksanakan tugasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, teori demokrasi representasi pada penelitian ini merupakan sebuah pemahaman mengenai perwakilan yang seharusnya BPD sebagai orang yang mewakili ditingkat desa itu harus menerima apa yang diinginkan oleh yang diwakilinya dan berdasarkan permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD yang menjelaskan terkait dengan tugas penyerapan aspirasi masyarakat BPD tidak memenuhi indikator tersebut. Hal ini membuktikan bahwa BPD di desa bakung ini memang benar “Tidak” melakukan tugasnya dalam penyerapan aspirasi masyarakat.